

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Selama beberapa dekade terakhir, kemiskinan telah menjadi permasalahan global yang terus berulang dan dialami oleh banyak negara di seluruh dunia. Menurut Bank Dunia (2024) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (2024) standar perhitungan yang ditetapkan mengenai kemiskinan adalah individu yang memiliki pendapatan kurang dari \$2,15 dalam sehari. Pada tahun 2015, secara global, lebih dari 736 juta orang dari 7,5 miliar orang berada pada garis kemiskinan yang ekstrem, angka ini mencapai 10% dari populasi dunia saat itu.

Kemiskinan menjadi masalah yang mendapat perhatian lebih oleh seluruh negara, hal ini tertuang dalam sebuah agenda dan kampanye global yaitu *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDGs merupakan suatu agenda pembangunan yang bertujuan mendorong banyak sektor seperti sosial, ekonomi, pendidikan, dan masih banyak lainnya. Dalam pelaksanaannya, SDGs memiliki prinsip yaitu tidak ada seorang pun yang akan terlewatkan atau dikenal dengan “*No-one left Behind*” (Localise SDG, 2025).

Secara garis besar, SDGs memiliki 17 tujuan utama dan tujuan SDGs yang pertama adalah “*No Poverty*” atau tanpa kemiskinan. SDG 1 memiliki tujuan bahwa pada tahun 2030, kemiskinan secara ekstrem akan dituntaskan (Localise SDG, 2025). Namun, hal ini menjadi suatu permasalahan karena perhitungan terbaru mengenai kemiskinan yang dilakukan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 9,2% penduduk dunia saat ini masih berada dalam kemiskinan. Perhitungan ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang masih berada dalam kemiskinan pada tahun 2023 sekitar 700 juta orang. Apabila hal ini terus terjadi, diperkirakan pada tahun 2030 tingkat kemiskinan hanya akan mengalami sedikit penurunan dan sekitar 600 juta jiwa akan tetap berada di bawah garis kemiskinan (United Nations, 2024; World Bank, 2024).

Sampai saat ini kemiskinan masih menjadi isu yang menakutkan untuk seluruh negara di dunia. Menurut *United Nations Development Programme* (2024), kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana individu mengalami kehidupan yang kurang layak seperti kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya baik secara pangan, kesehatan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Kemiskinan dapat menjadi akar dari permasalahan-permasalahan lain yang dialami oleh individu seperti kesehatan yang buruk, kurangnya akses pendidikan, dan lingkungan sosial yang buruk (Green Network, 2023). Oleh karena itu, dengan fokus pada solusi dalam menyelesaikan masalah kemiskinan, secara tidak langsung juga akan meningkatkan kemudahan dalam menyelesaikan permasalahan lain, mengingat kemiskinan menjadi akar dari beberapa permasalahan yang saling berkaitan.

Salah satu negara yang juga tidak luput dari permasalahan dalam menghadapi parahnya angka kemiskinan adalah Indonesia. Menurut data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (2025), dalam sepuluh tahun terakhir jumlah masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan selalu berada di atas 20 juta jiwa, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan masih sangat tinggi. Angka kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren menurun dari 11,46% (28,60 juta jiwa) pada September 2013 menjadi 8,57% (24,06 juta jiwa) pada September 2024. Penurunan ini terjadi secara bertahap, tercatat 11,13% (28,51 juta) pada 2015 dan 9,57% (26,36 juta) pada 2022 (Badan Pusat Statistik, 2025).

Berdasarkan data terbaru yang diunggah oleh Badan Pusat Statistik pada September 2024 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan, masyarakat yang berada di bawah angka kemiskinan mencapai 24,06 juta orang dengan persentase hingga 8,57%. Walaupun angka dan persentase kemiskinan selalu mengalami penurunan, namun jumlah masyarakat yang masih terjebak di dalam kemiskinan tetap membutuhkan perhatian lebih. Selain itu, ternyata angka kemiskinan tidak hanya terjadi di pedesaan saja, tetapi kemiskinan juga menjadi masalah pada perkotaan. Berdasarkan data yang diunggah BPS pada September 2024 daerah perkotaan memiliki jumlah masyarakat miskin sebanyak 11,05 juta orang atau sekitar 6,66% (Badan Pusat Statistik, 2025).

Banyaknya masyarakat miskin di perkotaan menjadi salah satu isu yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Perkotaan merupakan wilayah yang terdiri dari

pusat kota dan daerah di sekitarnya yang saling terhubung secara administratif yang memiliki kegiatan utama bukan pertanian (Kustiwan, 2014). Perkotaan juga merupakan pusat pergerakan ekonomi karena perkotaan adalah daerah dengan tingkat produktivitas serta inovasi yang tinggi. Banyaknya keuntungan yang dimiliki oleh perkotaan membuat kota dinilai mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya (BPIW, 2018). Namun, dengan keunggulan yang seharusnya dapat memberikan peningkatan kualitas hidup, kemiskinan masih terjadi di daerah perkotaan dan hal ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut.

Dalam beberapa tahun terakhir, urbanisasi menjadi salah satu tren penyebab kemiskinan perkotaan yang tidak dapat dihindari. Tingginya fenomena ini terjadi karena stigma masyarakat yang beranggapan bahwa melakukan perpindahan dari desa ke kota adalah sebuah kemajuan. Hal ini didasarkan karena perkotaan memiliki sektor pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan yang lebih maju dan mudah diakses (Universitas Airlangga, 2024). Walaupun urbanisasi dapat dianggap sebagai kemajuan dalam segi ekonomi dan dapat menjadi pendorong dalam faktor ekonomi (Kompasiana, 2024; Taufiq N & Retnosari L, 2025), kecenderungan sikap tidak siap dari setiap kota dalam menerima masyarakat urbanisasi cukup menjadi penghambat (Taufiq N & Retnosari L, 2025).

Semakin berkembangnya fenomena urbanisasi dapat membuat proses dan banyaknya perpindahan masyarakat dari pedesaan menuju perkotaan menjadi tidak terkendali, sehingga berdampak pada terjadinya ketimpangan sosial pada masyarakat di perkotaan. Urbanisasi sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan penduduk, di mana tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan di wilayah perkotaan sering kali disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk (Wahab & Sudirman, 2023). Hal ini berarti penambahan lapangan pekerjaan suatu kota kalah cepat dengan penambahan jumlah penduduk. Walaupun perkotaan dianggap sebagai pusat dari pergerakan ekonomi, tidak meratanya pembangunan dari setiap kota juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketimpangan sosial, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan (Fadhil dkk, 2024).

Tidak meratanya distribusi pembangunan dari sektor pendidikan dapat membuat masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung lebih sulit untuk

berkompetisi dalam mencari pekerjaan dengan masyarakat yang tidak kesulitan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini akan membuat tidak meratanya pendapatan masyarakat yang juga akan menyebabkan ketimpangan sosial (Wahab & Sudirman, 2023). Kondisi ketimpangan ini diperburuk dengan kondisi lapangan pekerjaan yang tidak merata dan sangat tingginya biaya yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan (Taufiq N & Retnosari L, 2025).

Tidak sejalannya pertumbuhan penduduk dengan jumlah lapangan pekerjaan dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat miskin yang memiliki pekerjaan pada sektor informal. Sektor pekerja informal adalah kumpulan dari usaha-usaha kecil yang tidak terstruktur dan tidak terdaftar secara resmi. Sektor ini ditandai dengan usaha yang memiliki modal dan skala yang kecil, memiliki keamanan yang rendah dalam pekerjaan, serta memiliki tingkat pendidikan rendah (Putri dkk, 2024). Pekerjaan-pekerjaan pada sektor informal meliputi pedagang kaki lima, pekerja lepas, asisten rumah tangga, ojek, serta masih banyak contoh lainnya. Sektor pekerjaan informal menjadi tempat bagi masyarakat miskin menggantungkan keberlangsungan hidupnya. Hal ini dapat dilihat pada Agustus 2023, di mana dari 147,71 juta penduduk yang memiliki pekerjaan sebanyak 82,67 juta merupakan penduduk dengan pekerjaan informal (Fadhil dkk, 2024). Kondisi-kondisi tersebut semakin memperjelas adanya ketimpangan.

Selain urbanisasi dan ketimpangan sosial, kondisi serta pola penggunaan sumber daya di perkotaan dan pedesaan juga menjadi alasan terjadinya kemiskinan di perkotaan. Perkotaan memang menyediakan fasilitas yang lebih maju dibandingkan pedesaan, namun fasilitas-fasilitas ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Bagi masyarakat perkotaan, sumber daya yang digunakan dalam bertahan hidup adalah uang. Semua hal membutuhkan uang dan tanpa uang masyarakat tidak akan mendapatkan apa-apa (Wahab & Sudirman, 2023). Sementara itu bagi masyarakat pedesaan, uang bukanlah sumber daya utama dalam bertahan hidup. Kehidupan masyarakat pedesaan erat hubungannya dengan alam, mata pencaharian utama mereka adalah petani, sehingga masyarakat yang tidak memiliki uang masih bisa memenuhi kebutuhan pangan dengan menggunakan panen (Husein, 2021; Wahab & Sudirman, 2023). Kondisi perkotaan yang sangat bergantung pada uang menyebabkan masyarakat yang tidak memiliki penghasilan

memadai menjadi terpinggirkan, karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan terbatas dalam mengakses layanan seperti kesehatan dan pendidikan.

Perbedaan antara masyarakat kota dan desa juga terjadi pada nilai kebersamaan dan tingkat empati antar sesama. Masyarakat pedesaan cenderung memiliki nilai kebersamaan dan gotong royong yang tinggi. Ketika ada beberapa masyarakat yang sedang dalam kondisi sulit, mereka akan berbondong-bondong membantu secara bergantian. Berbanding terbalik dengan masyarakat desa, masyarakat perkotaan cenderung memiliki sifat individualis dan tidak memiliki tingkat kepedulian yang tinggi, ketika masyarakat perkotaan mengalami kesulitan tidak ada jaminan orang lain akan membantunya (Husein, 2021; Wahab & Sudirman, 2023). Tingginya nilai individualis yang dimiliki oleh masyarakat perkotaan membuat masyarakat perkotaan cenderung kurang memiliki rasa solidaritas sosial, sehingga ketika ada masyarakat lain yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tidak ada jaminan akan ada yang membantu individu tersebut. Hal ini juga menjadi alasan masyarakat perkotaan tetap terjebak dalam kemiskinan.

Salah satu perkotaan yang menjadi inti pada penelitian ini adalah Jakarta. Dilansir berdasarkan Kompas (2024) Jakarta merupakan daerah yang menjadi pusat dari pergerakan dan pergeseran ekonomi dengan skala nasional maupun multinasional. Selain itu, Jakarta juga digadang-gadang akan menjadi kota global sehingga Jakarta diharapkan dapat menjadi wilayah yang menopang perekonomian nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang menyebutkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Jakarta menjadi wilayah yang paling besar dalam menyumbang APBD. Namun dengan kondisi ini Jakarta juga tetap tidak luput dari kemiskinan, menurut BPS (2025) terdapat sekitar 464.930 jiwa (4,44%) masyarakat Jakarta yang berada pada garis kemiskinan.

Kemiskinan dapat menjadi akar dari berbagai permasalahan, kemiskinan dapat menjadi penyebab dalam munculnya beberapa hal negatif, seperti tekanan stres dan emosi negatif lainnya (Haushofer & Fehr, 2014). Berdasarkan kondisi-kondisi yang telah dijelaskan sebelumnya, perkotaan menjadi tempat yang paling memungkinkan dalam memberikan tekanan kepada masyarakatnya. Argumentasi ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan bahwa masyarakat yang

tinggal di perkotaan lebih memungkinkan mengalami stres daripada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan (Cahyaningtyas & E. Kusuma, 2020) .

Kemiskinan dapat menjadi sumber dari munculnya emosi negatif yang dialami oleh individu. Emosi negatif ini dapat mempengaruhi produktivitas dari seseorang, sehingga dapat menyebabkan terjadinya lebih banyak lagi kemiskinan (Haushofer & Fehr, 2014). Selain itu, lingkungan di mana seseorang dilahirkan juga dapat menjadi penyebab terjadinya kemiskinan (Haushofer & Fehr, 2014; Haushofer & Salicath, 2024). Kombinasi dari hal tersebut dapat meningkatkan kesulitan seseorang untuk keluar dari kemiskinan, inilah yang disebut dengan *Poverty Trap* atau jebakan kemiskinan.

Kemiskinan memiliki banyak dampak negatif, baik secara sosial maupun secara psikologis. Salah satu dampak dari kemiskinan adalah dapat mempengaruhi cara seseorang dalam mengambil keputusan. Seseorang yang sedang mengalami kekurangan secara ekonomi akan cenderung mengambil keputusan secara impulsif dan tidak memiliki pertimbangan yang baik. Hal ini didukung dengan penelitian yang telah dilakukan, di mana seseorang yang sedang berada dalam kondisi kemiskinan cenderung akan menghindari risiko dan cenderung akan berorientasi jangka pendek dalam mengambil keputusan (Haushofer & Fehr, 2014). Selain itu, seseorang yang sedang berada pada kemiskinan juga memiliki kemauan yang rendah untuk melakukan investasi pada sesuatu yang memiliki orientasi jangka panjang seperti pendidikan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari menghindari risiko. Kebiasaan dan orientasi seperti ini akan menyulitkan mereka dalam upaya keluar dari jebakan kemiskinan.

Terjadinya permasalahan dalam pengambilan keputusan ini terjadi didasari karena perilaku yang disebut diskonto waktu atau *time discounting*. Diskonto waktu adalah pengurangan nilai saat ini dari suatu hadiah ketika terjadinya penundaan dalam mendapatkan hadiah tersebut (Kirby dkk., 1999). Ini berarti semakin lama hadiah tersebut didapatkan maka semakin rendah nilainya untuk si penerima, sehingga ketika dihadapkan dengan suatu pilihan semakin kecil kemungkinan hadiah tersebut akan dipilih. Setiap individu memiliki tingkat diskonto waktu yang berbeda, semakin tinggi tingkat diskonto waktu seseorang maka individu tersebut

akan memiliki kecenderungan untuk memilih hadiah yang dapat diterima dengan cepat walaupun nilai hadiah tersebut lebih kecil (Kirby, 1997; dalam Kirby 1999).

Seseorang yang hidup dalam kemiskinan memiliki tingkat diskonto waktu yang tinggi. Sehingga setiap keputusan yang diambil lebih berfokus pada hari ini dibanding hari yang akan datang (Haushofer & Fehr, 2014). Penelitian lain juga mendukung hal ini, Hilbert (2022) menemukan bahwa kelangkaan secara finansial dapat mendorong suatu individu membuat keputusan untuk mendapatkan sesuatu secara cepat walaupun harus melepaskan kemungkinan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar di masa depan. Penelitian yang sama juga menemukan bahwa kondisi ini juga dapat membuat individu tidak jarang untuk memilih suatu hal yang secara jangka pendek memiliki konsekuensi positif namun juga memiliki konsekuensi negatif secara jangka panjang.

Beberapa penelitian lain yang dilakukan juga memiliki hasil yang selaras. Jika perbandingan dilakukan dengan membandingkan individu yang memiliki kondisi ekonomi yang stabil dan individu yang mengalami kelangkaan finansial akan didapatkan hasil bahwa individu dengan kondisi ekonomi stabil cenderung lebih mampu mempertimbangkan hasil jangka panjang, sedangkan individu yang mengalami kelangkaan finansial lebih fokus pada hasil yang bisa diperoleh dalam waktu dekat. (Haushofer & Ernerst, 2014; Hilbert dkk., 2022; Ruggeri dkk., 2022; Sharma dkk., 2023; Hilbert dkk., 2024). Penelitian-penelitian tersebut dapat memberikan gambaran mengenai seberapa sering individu dalam konteks kemiskinan melakukan diskonto waktu.

Salah satu contoh konkret dalam kehidupan sehari-hari mengenai terjadinya perilaku diskonto waktu dapat dilihat pada Noviawati (2017), ketika survei dilakukan kepada sekelompok individu yang mengalami kemiskinan dengan salah satu *item* yang ditanyakan adalah solusi dari kemiskinan, lebih banyak responden yang merasa meminjam uang dan berhutang lebih efektif dalam mengatasi dan mengeluarkan seseorang dari kemiskinan dibandingkan menempuh pendidikan yang memiliki orientasi waktu yang lebih panjang.

Tingginya tingkat diskonto waktu dapat disebabkan karena terganggunya kemampuan pengambilan keputusan individu. Proses pengambilan keputusan dapat digambarkan oleh suatu model bernama “*dual-process system*” yang menjelaskan

bahwa pengambilan keputusan melibatkan dua sistem kognitif yaitu sistem 1 dan sistem 2 (Kahneman, 2003; Frederick, 2006; Lindell, 2014). Sistem 1 dapat disebut dengan sistem intuitif, pengambilan keputusan biasanya dilakukan secara impulsif, cepat, dan tanpa usaha lebih, sedangkan sistem 2 dapat disebut dengan sistem rasional ataupun reflektif, pengambilan keputusan biasanya dilakukan dengan lebih lama, reflektif dan menggunakan usaha lebih (Kahneman, 2003; Frederick, 2006).

Frederick (2006) dan Sirota dkk (2018) *Dual-process system* dapat disebut sebagai refleksi kognitif (Frederick, 2006; Sirota dkk, 2018). Sejumlah studi menunjukkan bahwa refleksi kognitif dapat menjadi prediktor kuat dalam tingginya perilaku diskonto waktu individu (Lempert & Phelps, 2016). Refleksi kognitif merupakan suatu keterampilan kognitif individu dalam mempertimbangkan dan menghasilkan jalan keluar untuk suatu permasalahan dengan cara yang kritis dan tidak bersifat intuitif. Alasan kurang direkomendasikannya sistem intuitif dalam pengambilan keputusan karena sistem intuitif lebih rawan terciptanya kesalahan maupun bias, terutama pada kondisi tertekan (Lindell, 2014).

Kemiskinan penuh dengan ketidakpastian, kondisi ini memunculkan tekanan yang dapat mendorong terjadinya penggunaan sistem intuitif dalam pengambilan keputusan sehingga menyebabkan individu memiliki tingkat diskonto waktu yang tinggi. Individu yang berada pada kemiskinan secara impulsif mengambil keputusan yang berfokus pada jangka pendek. Namun, hubungan itu dapat dilemahkan maupun diperkuat dengan variabel psikologis lainnya. Salah satu alasan terjadinya diskonto waktu adalah kurangnya kemampuan *self-control* pada individu yang mengalami kemiskinan (Haushofer & Fehr, 2014). Variabel *self-control* yang paling relevan dan berpotensi memengaruhi diskonto waktu adalah kemampuan menunda kepuasan (*delay of gratification*).

Delay of gratification merupakan kemampuan individu dalam melakukan kontrol, melakukan penundaan atau mempertahankan diri dari impulsivitas untuk merasakan kepuasan jangka pendek demi mendapatkan kepuasan jangka panjang yang lebih bernilai (Hoerger dkk, 2011). Hal ini sangat selaras dengan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, di mana individu yang memiliki kemampuan *delay of gratification* yang tinggi cenderung lebih mampu menahan diri dari perilaku diskonto waktu. Hal ini disebabkan oleh kontrol dan penundaan

yang dilakukan dapat membuat individu melakukan refleksi kognitif ketimbang langsung membuat keputusan secara cepat dan impulsif, Oleh karena itu, *delay of gratification* menjadi variabel yang memiliki potensi tinggi dalam menurunkan diskonto waktu yang kerap terjadi pada masyarakat yang mengalami kondisi kemiskinan.

Penelitian mengenai kemiskinan di Indonesia memang telah banyak dilakukan, namun penelitian yang dimaksud lebih banyak melalui sudut pandang ekonomi. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang masih membutuhkan pengkajian-pengkajian lebih lanjut khususnya dari sudut pandang psikologi. Beberapa penelitian sebelumnya menemukan bahwa individu dengan tingkat refleksi kognitif yang tinggi cenderung memiliki tingkat diskonto waktu yang rendah (Cheng & Janssen, 2019). Namun, penelitian-penelitian yang telah dilakukan hanya fokus pada hubungan kedua variabel dan masih kurang mempertimbangkan peran variabel lain yang memiliki potensi memberikan pengaruh kepada hubungan kedua variabel tersebut, seperti *delay of gratification*. Oleh karena itu, dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap dan berupaya untuk dapat mengisi kekosongan tersebut dengan membahas peran *delay of gratification* sebagai variabel moderator yang memiliki tujuan dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi masalah yang menjadi bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan merupakan masalah yang dialami oleh banyak negara
2. Kemiskinan di Indonesia masih memiliki persentase yang tinggi, tidak hanya di pedesaan namun juga perkotaan.
3. Kemiskinan di perkotaan adalah isu yang unik dan memiliki faktor yang saling berkaitan.
4. Masyarakat miskin perkotaan cenderung memiliki diskonto waktu yang disebabkan karena terganggunya refleksi kognitif

5. Belum banyak penelitian yang mengkaji *delay of gratification* sebagai variabel moderator dalam hubungan antara refleksi kognitif dan diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka diperlukan adanya pembatasan masalah dengan tujuan penulisan dan pembahasan tidak menyimpang dari tujuan utamanya. Penelitian ini membatasi permasalahan pada peran *delay of gratification* dalam memoderasi pengaruh antara refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah *delay of gratification* sebagai moderator memiliki peran dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disajikan, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui *delay of gratification* sebagai moderator memiliki peran dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Secara teori, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menjadi tambahan wawasan bagi para pembaca mengenai bidang ilmu psikologi sosial. Serta dapat memperkaya sumber referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya peneliti yang ingin membahas fenomena kemiskinan dari sudut pandang psikologi.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai peran *delay of gratification* dalam percobaan pemutusan rantai kemiskinan dan keluar dari *poverty trap*.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta menjadi salah satu alternatif yang dapat dilakukan jika ingin memberikan intervensi kepada masyarakat miskin.

